

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arba, Muhammad, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, 2021.
- Arief, Barda Nawawi, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Emirzon, Joni, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Miller, David L, Introduction to collective behavior and collective action, Waveland Press, 2013.
- Panggabean, Dr HP, Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia, Bhuana Ilmu Populer, 2020.
- Ruslan Renggong, S. H, Hukum Pidana Khusus, Prenada Media, 2017.
- Sekarmadji, Agus, dan Oemar Moechthar, Seri Hukum Agraria-Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang, Airlangga University Press, 2023.
- Sembiring, Jimmy Joses, dan M. Sh, Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan, Visimedia, 2011.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun (Edisi Pembaruan), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Sjawie, Hasbullah F., and LL M. SH. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR. Prenada Media, 2018.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sunarto, Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Warjiyati, Sri, Ilmu Hukum Adat, Deepublish, 2020.

Wibowo, Kurniawan Tri, MH SH, dan S. H. Warih Anjari, Hukum pidana materiil, Prenada Media, 2022.

## **B. Artikel Jurnal**

Arindya, Radita, Optimalisasi Kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK-Migas), Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti 3, no. 1, 2018.

Aritonang, Agnes Grace, Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, CREPIDO 3, no. 1, 2021.

Baehaqi, Eki Sirojul, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman 1, no. 1, 2022.

Datau, Frieska Jayanthi, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Gorontalo), Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik 1, no. 3, 2023.

Hasan, Zainudin, Safina Nuzulul Rahma, Allisa Qotrunnada Munawaro, Khenny Fernandez, dan Nita Selima Ayu, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak

- Pidana Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanggamus Lampung, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 2, 2024.
- Hidayat, Muhammad Rifqi, dan Parman Komarudin, *Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi*, *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2, 2020.
- Hidayati, Taufika, *Analisa Yuridis Akta Jual Beli Sebagai Kekuatan Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah*, *Jurnal Terapan Ilmu Pengetahuan* 1, no. 01, 2022.
- Horah, Riris Fadaniyah Moh, dan Erie Hariyanto, *Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi*, *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 1, 2021.
- Kusnadi, Apriliani, dan Devi Siti Hamzah Marpaung, *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)*, *Wajah Hukum* 6, no. 1, 2022.
- Lubis, Muhammad Ridwan, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 20, no. 2, 2021.
- Mangawi, Budi, Basri Oner, dan Andi Tira, *Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Tuntutan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah: Studi Putusan No. 75/Pid. B/2021/Pn. Mak.* *Clavia* 21, no. 1, 2023.
- Manurung, Rachel Octavia, FC Susila Adiyanta, dan Henny Juliani, *Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha*

- Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional, *Administrative Law and Governance Journal* 5, no. 2, 2022.
- Massie, Mahendri, Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP, *Lex Crimen* 6, no. 7, 2017.
- Migas, Putusan MK, Pengaturan Atas Pelaksanaan Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia (Kajian Terhadap: Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Dan UU Cipta Kerja), *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1, 2022.
- Pasmatuti, Darda, Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1, 2019.
- Piin, Muhammad Fhariedz Alfarizi, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Emilia Susanti, Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah Di Wilayah Tulang Bawang, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(2), 2024.
- Pratiwi, Putri Ayu, Ningrum Natasya Sirait, Mahmud Siregar, dan Jelly Leviza, Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Minyak Dan Bumi, *Usu Law Journal* 7, no. 4, 2019.
- Ramadhani, Rahmat, Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 1, 2021.
- Ritonga, Nurahma Aisyiyah, Holding Company Bumn Sektor Minyak Bumi Dan Gas (Migas) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 6, 2022.

Sappe, Suryani, Adonia Ivone Latturete, dan Novyta Uktolseja, Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa, *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1, 2021.

Silviana, Ana, Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementasi, *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1, 2017.

Sudarto, Razief Ardi Cahyo, dan Hartanti Hartanti, Model Penyelesaian Perkara Menempati Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Di Tinjau Dari Hukum Pidana, *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 6, no. 1, 2022.

Sukananda, Satria, Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 2021.

Sumartono, Sumartono, Syarif Budiman, Ahmad Ahmad, Fakhri Aldifha Kurnia, Irwansyah Irwansyah, dan Isam Tuanaya, Pengelolaan Barang Milik Negara Bidang Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Journal on Education* 5, no. 4, 2023.

Weku, Robert, Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Lex Privatum*, 1(2), 2013.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Hak Penguasaan Hutan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2008.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

#### **D. Website**

<https://www.alsalcunsri.org/post/praktik-penyerobotan-tanah-di-indonesia-dalam-perspektif-hukum-positif>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2040-tanah-negara>